



The Symbolic War in The Discourse on The Extension of The Community Activities Restrictions Enforcement (CARE)

Pertarungan Simbolik dalam Wacana Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Andi Krama Wijaya, Anang Santoso*

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

*Penulis korespondensi, Surel: anang.santoso.fs@um.ac.id

Paper received: 21-4-2022; revised: 18-7-2022; accepted: 27-7-2022

Abstract

This research was conducted to reveal things related to symbolic war, ranging from the forms of symbolic war, the mechanism for the occurrence of symbolic war, as well as the reasons that led to the occurrence of symbolic war. The research on this symbolic war focused on the discourse on the extension of the Community Activities Restrictions Enforcement (CARE). The theory used in this research is Norman Fairclough's theory of critical discourse analysis and Pierre Bourdieu's symbolic war theory. This research is qualitative. The data in this study are in the form of words, clauses, sentences or narratives that were documented from media articles on the internet which were released between January 1 to November 30, 2021. The data analysis was carried out by collecting, selecting, and presenting data according to the problem formulation. Through a series of analyzes it was found 18 data according to the formulation of the problem. The result shows that (1) the form of symbolic war includes forms of pro-government and contra against the government, (2) the mechanism of symbolic war includes euphemism and logic, and (3) the reasons for the occurrence of symbolic war were based on differences in interests.

Keywords: symbolic war, PPKM, government

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan pertarungan simbolik, mulai dari bentuk-bentuk pertarungan simbolik, mekanisme terjadinya pertarungan simbolik, serta alasan yang menyebabkan terjadinya pertarungan simbolik. Penelitian tentang pertarungan simbolik ini difokuskan pada wacana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori analisis wacana kritis Norman Fairclough dan teori pertarungan simbolik Pierre Bourdieu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa kata, klausa, kalimat atau narasi yang bersumber dari artikel media. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi yaitu tangkapan layar. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan artikel media di internet yang dirilis antara 1 Januari hingga 30 November 2021. Prosedur analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyeleksi, dan menyajikan data sesuai rumusan masalah. Melalui serangkaian analisis ditemukan 18 data yang tepat berdasarkan rumusan masalah. Penelitian ini menunjukkan hasilnya yang terdiri atas (1) bentuk pertarungan simbolik yang meliputi bentuk pro pemerintah dan kontra terhadap pemerintah, (2) mekanisme pertarungan simbolik yang meliputi eufimisme dan pelogisan, dan (3) alasan terjadinya pertarungan simbolik yang dilandasi oleh perbedaan kepentingan.

Kata kunci: pertarungan simbolik, PPKM, pemerintah

1. Pendahuluan

Pada tahun 2019 sebuah virus yang menyerang pernapasan manusia mulai muncul di salah satu kota di negara China. Coronavirus atau akrab dikenal dengan istilah COVID-19 adalah cikal bakal wabah yang melanda seluruh dunia saat ini. Kota Wuhan sebagai tempat yang dianggap ditemukannya kasus COVID-19 pertama kali seketika menjadi pusat perhatian

dunia. Banyak teori dan anggapan yang mengatakan bahwa virus tersebut berasal dari daging kelelawar yang gemar dikonsumsi oleh masyarakat Wuhan. Kebiasaan orang China yang suka mengonsumsi daging-daging binatang liar dianggap sebagai kebiasaan yang aneh dan menjijikkan. Kebiasaan tersebut menjadi alasan seluruh dunia untuk memandang sinis negara China. Sebuah pasar yang sempat menjadi tempat jual beli daging binatang kemudian ditutup karena dianggap sebagai sumber utama penyakit sekaligus sebagai upaya pemerintah setempat dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19.

Banyak negara di dunia yang menjadi korban dari merebaknya virus COVID-19 dan Indonesia menjadi salah satu dari negara-negara tersebut. Pada tahun 2020, COVID-19 secara resmi dinyatakan sudah memasuki beberapa wilayah di Indonesia. Tentu saja dari datangnya virus COVID-19 membawa sejumlah dampak dalam kehidupan yang kian mulai terasa. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada masalah kesehatan saja, namun meluas juga ke sendi-sendi kehidupan lainnya seperti lesunya perekonomian atau macetnya pendidikan. Dampak COVID-19 sangat terasa bagi masyarakat yang berekonomi menengah ke bawah. Banyak buruh-buruh pabrik yang terkena PHK (Putus Hubungan Kerja) atau para pedagang yang mulai kehilangan pembeli. Selain itu, dalam dunia pendidikan COVID-19 mengakibatkan peralihan dari sekolah yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka menjadi sekolah daring (dalam jaringan). Banyak hambatan yang harus dihadapi para siswa seperti perlunya memiliki gawai dan akses internet yang memadai dalam mengikuti sekolah daring. Di lain sisi, sekolah daring dianggap tidak efektif dan efisien dalam menyampaikan ilmu. Hal tersebut dilandasi karena siswa yang lebih suka bermain gawai dibanding mengikuti kelas daring. Di bidang kesehatan, pasien positif COVID-19 kian melonjak setiap hari. Pasien yang telah dinyatakan positif wajib menjalankan isolasi mandiri (isolasi mandiri) selama dua pekan guna mengetahui perkembangan virus yang telah menjangkit. Apabila kondisi pasien sudah pulih selama melaksanakan isolasi mandiri maka pasien sudah diperbolehkan melakukan aktivitas di luar ruangan. Namun jika selesai isolasi mandiri pasien belum sembuh maka tindakan kesehatan lanjutan akan dilakukan. Kematian akibat COVID-19 tidak dapat dianggap sebelah mata. Palsunya kematian di Indonesia perhari mencapai angka ratusan hingga ribuan jiwa. Jika digali lebih dalam korban-korban meninggal dunia tersebut bisa saja seorang ayah atau ibu dalam sebuah keluarga yang meninggalkan anak-anaknya.

Pemerintah dalam upaya mengurangi angka penyebaran dan kematian akibat COVID-19 merumuskan beberapa kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah antara lain mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Sosial Berskala Besar Transisi (PSBB Transisi), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM Mikro), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4-3 (PPKM Level 4-3). Selain itu pemerintah juga mengadakan program vaksinasi yang ditujukan kepada rakyat yang berusia di atas 17 tahun. Vaksinasi dilakukan dengan tujuan melakukan pencegahan penularan. Jika kebijakan pembatasan sosial adalah upaya pemerintah mencegah penularan dari luar, maka vaksinasi merupakan pencegahan dari dalam. Inti dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah membatasi aktivitas masyarakat agar angka penyebaran COVID-19 tidak mengalami kenaikan terus-menerus. Kebijakan tersebut dimulai pada tanggal 10 April 2020 dan masih diterapkan sampai saat ini, namun dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut mengalami perubahan istilah. Dari pembatasan sosial menjadi pembatasan kegiatan masyarakat.

Dalam dunia perpolitikan diketahui ada dua kelompok yang saling berhadapan yakni petahana dan oposisi. Petahana adalah kelompok yang memenangkan pemilu dan menjalankan pemerintahan sekarang, kelompok ini juga dikenal dengan sebutan ortodoxa. Sedangkan oposisi adalah kelompok yang kalah dalam pemilu dan menjadi penentang pemerintah, kelompok ini dikenal juga dengan nama heterodoxa. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tidak lantas berjalan dengan lancar. Banyak pihak-pihak yang tidak setuju bahkan sampai mengkritisi dan menolak kebijakan-kebijakan tersebut. Pihak-pihak tersebut antara lain kelompok oposisi, aktivis atau mahasiswa. Sejalan dengan hal tersebut seringkali terjadi adu pendapat dan argumen antara pemerintah dan oposisi. Hal tersebut yang dewasa ini disebut sebagai pertarungan simbolik.

Pertarungan simbolik adalah sebuah persaingan, pertandingan, atau kompetisi untuk menjalankan kekuasaan atas pelaku sosial yang lain, atas eksistensinya, pandangannya, persepsinya, dan apresiasinya (Jazery, 2009). Pertarungan simbolik merupakan pertarungan tanpa menggunakan kekerasan fisik melainkan menggunakan bahasa sebagai alatnya. Tujuan dari pertarungan simbolik adalah untuk menang atau mendominasi lawan-lawannya. Pertarungan simbolik berlangsung terus menerus dan bergerak dinamis demi memperebutkan doksa (Wahyuni, 2014). Penyebab pertarungan simbolik antara lain karena perbedaan latar belakang, keyakinan, pemahaman, atau kebudayaan. Pertarungan simbolik sering ditemukan dalam wacana politik, hukum, atau agama. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan latar belakang membuat satu kelompok ingin mendominasi kelompok yang lain. Selain itu, pertarungan simbolik terjadi ketika kelompok ortodoxa mencoba mempertahankan legitimasinya dari kelompok heterodoxa. Nama lain dari legitimasi tersebut dewasa ini disebut sebagai doxa atau doksa.

Dalam pertarungan simbolik dapat dijumpai beberapa konsep penting, seperti habitus, modal, dan ranah. Ketiga konsep tersebut berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan sehingga disebut sebagai kekuatan simbolik. Bourdieu (1991) mendefinisikan kekuatan simbolik sebagai kekuatan untuk mengonstruksi realitas. Habitus merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Seperti kebiasaan membaca buku yang terjadi karena seringnya membaca buku sebelumnya. Akan tetapi habitus itu dapat berubah. Habitus akan selalu berubah seiring dengan berkembangnya modal yang dimiliki serta posisi dalam ranah (Taqwa & Sadewo, 2016).

Habitus dalam kehidupan sosial dapat menentukan kelas sosial dari seseorang. Kelas sosial tidak hanya dibagi atas borjuis dan proletar yang hanya didasarkan atas pemilikan produksi, tetapi juga menjangkau sendi-sendi kehidupan yang lain, seperti dunia pendidikan, hukum, dan agama. Sebagai contoh seorang mahasiswa yang aktif dalam diskusi di dalam atau luar kelas menduduki kelas sosial yang lebih tinggi daripada mahasiswa pasif yang tidak suka mengikuti diskusi dan lebih memilih berdiam diri saja. Habitus rajin mengikuti diskusi itulah yang menentukan kelas sosial mahasiswa.

Selain habitus juga dikenal konsep modal. Modal itu sendiri dibagi menjadi empat macam (budaya, sosial, ekonomi, dan simbolik). Menurut Taqwa dan Sadewo (2016), modal budaya merupakan pengetahuan dan pemahaman yang didapatkan dari generasi ke generasi. Modal sosial dapat berupa pangkat atau jabatan dalam lembaga, organisasi atau institusi sosial. Modal ekonomi adalah harta kekayaan yang dimiliki seseorang, seperti uang, kendaraan, bisnis, dan lainnya. Secara khusus, Harker (dalam Taqwa dan Sadewo, 2016) mendefinisikan

modal simbolik sebagai modal ekonomi yang telah mengalami perubahan atau transformasi yang dapat dikenali dengan simbol-simbol dalam struktur yang ada dan penguasaan simbol. Semakin banyak modal yang dimiliki individu maka potensi untuk memenangkan pertarungan menjadi semakin besar. Dalam wacana politik para politisi yang memiliki latar belakang seorang sarjana dan seorang pengusaha memiliki peluang yang besar untuk menjadi anggota dewan saat pemilu.

Konsep selanjutnya adalah ranah atau arena. Ranah atau arena adalah tempat atau konteks di mana proses sosial itu terjadi. Menurut Bourdieu, arena sosial merupakan arena pertarungan antara wacana dominan atau doxa dengan wacana-wacana lain yang ingin menggugatinya (Wahyuni, 2008). Misalnya Joko Widodo menjadi pemenang kontestasi pilpres 2019, maka beliau menjadi bagian dari kelompok ortodoxa, sementara kelompok-kelompok yang kalah dalam pilpres tersebut seharusnya menjadi kelompok heterodoxa. Media massa dan media sosial sering menjadi arena pertarungan simbolik dan kekerasan simbolik. Sebagai arena pertarungan, kepemilikan terhadap modal kapital menjadi penentu utama kemenangan (Pribadi, 2016). Tema-tema yang sering memicu terjadinya pertarungan simbolik antara lain politik, agama, olahraga, dan bahkan hiburan. Salah satu tujuan dari perang wacana dalam pertarungan simbolik adalah untuk mendapatkan doxa yang merupakan suatu kekuasaan atau legitimasi. Senada dengan hal tersebut Winarsih (2013) mendefinisikan doxa sebagai dunia wacana yang mendominasi kehidupan. Doxa dapat diperoleh melalui proses inkalkulasi atau proses penamaan yang berlangsung terus menerus dan efektif di dunia sosial (Dinurriyah, 2013). Dalam pertarungan tersebut tentu ada pihak yang menang dan kalah. Kelompok yang menang atau memiliki dominasi disebut ortodoxa dan kelompok yang kalah atau marginalisasi disebut heterodoxa. Kekalahan yang harus ditanggung dalam pertarungan simbolik bukanlah hal yang berbentuk luka fisik, melainkan kerugian simbolik seperti hilangnya nama baik, turunnya rasa kepercayaan publik atau beban mental dan pikiran.

Kelompok yang menang memiliki tujuan untuk mempertahankan kekuasaan atau legitimasi yang telah dicapai, sedangkan kelompok heterodoxa bertujuan untuk merebut doxa dari kelompok orthodoxya. Menurut Dinurriyah (2013), melalui media massa, kelompok ortodoxa melakukan praktik pendefinisian realitas, pembentukan ideologi politik, transaksi politik, pembentukan relasi ekonomi, dan pendefinisian ideologi gender. Di sisi lain, kelompok heterodoxa berupaya untuk mengganggu atau bahkan menggagalkan tujuan-tujuan dari kelompok ortodoxa.

Penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Jazery Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung pada tahun 2009 dengan judul "Pertarungan Simbolik dalam Wacana Bantuan Khusus Mahasiswa". Penelitian yang dilakukan tersebut berfokus pada bentuk-bentuk pertarungan simbolik, strategi-strategi yang digunakan, serta penyebab terjadinya pertarungan simbolik. Kedua, penelitian oleh Itsna Syahadatud Dinurriyah dosen Sastra Inggris, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2013 dengan judul "Konstruksi Gender dalam Pertarungan Simbolik di Media Massa". Penelitian yang dilakukan oleh Dinurriyah tersebut berfokus pada bentuk eufemisme dan sensorisasi dalam terjadinya pertarungan simbolik. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Suko Winarsih mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang pada tahun 2013 dengan judul "Representasi Bahasa dalam Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan". Fokus penelitian yang dilakukan oleh Winarsih ini meliputi wujud-wujud pertarungan simbolik antara kelompok ortodoxa dengan kelompok heterodoxa, serta strategi penghalusan.

Peneliti tertarik untuk mengkaji pertarungan simbolik dalam sebuah wacana politik karena peran bahasa yang dapat menjadi alat untuk memuluskan jalannya kekuasaan dan juga dapat menjadi ancaman bagi kekuasaan. Kajian ini difokuskan pada pertarungan simbolik dalam wacana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) mengetahui bentuk-bentuk, (2) mengungkap mekanisme, dan (3) menjelaskan alasan terjadinya pertarungan simbolik. Hal ini perlu diketahui oleh masyarakat sebagai subyek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai persoalan dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, hukum, budaya dan terutama politik patut menjadi fokus perhatian.

2. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri (Furchan, 1992). Dengan pendekatan penelitian kualitatif ini, peneliti membuat deskripsi tentang gambaran obyek yang diteliti secara sistematis, baik itu mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta berbagai hal yang terkait dengan tema penelitian.

Orientasi teoritis penelitian ini adalah analisis wacana kritis. Penggunaan analisis wacana bertujuan membongkar maksud dan makna tertentu (Eriyanto, 2006). Teori analisis wacana kritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Norman Fairclough. Dalam analisis wacana kritis Fairclough (2006), model analisis dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu (1) analisis tekstual, (2) analisis praktik sosial, dan (3) analisis sosiokultural. Pada dasarnya analisis wacana kritis Norman Fairclough digunakan untuk mengetahui aspek kebahasaan yang digunakan dalam memproduksi wacana serta menentang wacana dan praktik sosial yang melatarbelakangi aspek kebahasaan yang digunakan (Saraswati & Sartini, 2017).

Data penelitian ini berupa kata, klausa, kalimat, atau narasi. Sumber data penelitian diperoleh dari artikel media. Data dikumpulkan dengan cara dokumentasi yaitu tangkapan layar sumber data. Analisis data dalam penelitian ini memiliki tahapan yang dimulai dengan (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, dan (3) penarikan kesimpulan. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Miles & Huberman (dalam Nugrahani, 2014) bahwa tahapan analisis data meliputi tiga tahapan, yaitu (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari artikel media di internet dan mengunduhnya serta membaca tuntas isi artikel tersebut. Tahap reduksi data yaitu memilih atau menyeleksi data dan mengklasifikasikan atau menggolongkan data sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan hasil analisis dan pembahasan data serta memverifikasi temuan.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengunduh artikel media di internet yang dirilis antara tanggal 1 Januari sampai 30 November 2021. Selama rentang waktu tersebut telah dihasilkan 43 data dari 53 artikel yang direduksi menjadi 18 data dari 15 artikel. Data tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai rumusan masalah.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian yang telah dilakukan memperlihatkan lima belas artikel dari berbagai sumber yang menunjukkan pertarungan simbolik. Lima belas artikel tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Sumber Data dan Judul Artikel

Kode Artikel	Judul Artikel	Nama Media
APS1	PPKM Darurat Dikabarkan Mulai 30 Juni 2021, Wakil Ketua DPR: Satu Saja Warga Lalai Berpengaruh ke yang Lain	Pikiran Rakyat
APS2	Dukung Perpanjangan PPKM Darurat, PBNU: Keputusan Cermat	Kemenag
APS3	Pebisnis Logistik Dukung PPKM Level 4 Walau Akui Berat	Ekonomi Bisnis
APS4	Ini Alasan Didi Riyadi Menolak Perpanjangan PPKM Darurat Jawa dan Bali	Kompas TV
APS5	Buruh Tolak Perpanjangan PPKM	Radar Jogja
APS6	Tolak Perpanjangan PPKM Darurat, Bupati Jembrana: Permintaan Rakyat	Medcom.id
APS7	Bersembunyi Dibalik Istilah PPKM	Merdeka
APS8	Gerindra Sebut PPKM Darurat, Ikhtiar Penanganan COVID-19 dari Hulu	Jawa Pos
APS9	Kritik PPKM Darurat, Petir Sebut Timbulkan Kepanikan Rakyat	Gatra
APS10	Pedagang, Ojol, hingga Mahasiswa di Bandung Demo Tolak PPKM	IDN Times
APS11	Penerapan PPKM : Pertimbangkan Aspek Kesehatan, Ekonomi dan Dinamika Sosial	Kominfo
APS12	PPKM Darurat Dianggap Gagal dan Sengsarakan Rakyat, Presiden Jokowi Diminta Mundur	Kompas
APS13	Pemerintah Perpanjang PPKM, Luhut Tegaskan Tak akan Dihentikan hingga Kata Anies Baswedan	Tribun News
APS14	Koordinator Demo di Bandung Ungkap Alasan Tolak PPKM Darurat	CNN Indonesia
APS15	Kritik untuk PPKM Level 4: Kurangi Imbauan, Perbanyak Bantuan	PROKAL

3.1. Bentuk Pertarungan Simbolik

Bentuk pertarungan simbolik dalam wacana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dibagi menjadi dua, yaitu (1) pro dengan kebijakan pemerintah dan (2) kontra terhadap kebijakan pemerintah.

Pro dengan Kebijakan Pemerintah

Artikel yang pro dengan kebijakan pemerintah memiliki bentuk memberi dukungan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Dukungan-dukkungan tersebut dapat berasal dari partai koalisi pemerintah, organisasi masyarakat (ormas) atau pemerintah itu sendiri. Bentuk yang menunjukkan dukungan terhadap kebijakan pemerintah ditunjukkan dalam artikel (APS1), (APS2), dan (APS3). Hal tersebut dianggap sebagai dukungan karena latar belakang dan posisi sang eksekutor. Berikut kutipan yang menjadi buktinya.

- (1) Saya dengar juga kabar itu (PPKM Darurat). **Kebijakan ini patut diambil** melihat kasus COVID-19 di Indonesia yang terus naik. (APS1)
- (2) **NU sangat mendukung kebijakan pemerintah** menambah masa PPKM Darurat sampai 25 Juli 2021 mendatang, kami juga berdoa **semoga** pada tanggal 26 Juli 2021 PPKM Darurat ini diperkirakan secara bertahap dibuka. (APS2)

- (3) Kami sebagai pelaku usaha di sektor logistik, **dapat** memahami kebijakan yang diambil pemerintah untuk memperpanjang PPKM Level 4 hingga 25 Juli mendatang. **Opsi ini tidak bisa kita hindari** meskipun bagi kami inipun sangat berat. (APS3)

Kutipan-kutipan di atas merupakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam memperpanjang PPKM. Pertama, data (1) disampaikan oleh Abdul Muhaimin Iskandar selaku Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Kedua, data (2) disampaikan oleh Helmy Faishal Zaini, Sekretaris Jenderal PBNU. Ketiga, data (3) disampaikan oleh Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia).

Eksekutor pada data (1) merupakan kelompok pendukung pemerintah. Latar belakang partai eksekutor adalah partai koalisi pemerintah. Tentu wajar saja apabila eksekutor menyatakan dukungannya kepada kebijakan pemerintah. Eksekutor mengatakan bahwa "kebijakan PPKM Darurat patut diambil melihat kasus COVID-19 di Indonesia yang terus naik". Dikatakan dukungan karena pernyataan tersebut mengandung urgensi bahwa kebijakan PPKM itu merupakan opsi satu-satunya. Dukungan eksekutor tersebut menggunakan kalimat deklaratif dan menggunakan modalitas aletis. Kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan yang isinya bertujuan untuk disampaikan dan diketahui orang lain (Andriana, Tarmini, & Wetty, 2015), sedangkan modalitas aletis berfungsi untuk menyatakan keterangan adanya keperluan atau kepentingan yang perlu diambil. Modalitas aletis yang menandai kutipan tersebut adalah keperluan yang terwujud pada kata *patut*. Kata *patut* merepresentasikan pernyataan eksekutor yang mendukung perpanjangan PPKM.

Pada data (2) eksekutor adalah orang yang juga pro pemerintah, ditambah lagi organisasi masyarakatnya merupakan pendukung utama pemerintah saat pemilu. Tentu hal tersebut membuat eksekutor memberikan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah. Pernyataan eksekutor menunjukkan dukungan yang menggunakan kalimat deklaratif dan menggunakan modalitas intensional. Kalimat deklaratif dibuktikan dengan eksekutor mengatakan *NU sangat mendukung kebijakan pemerintah menambah masa PPKM Darurat*. Kata *sangat* dalam kalimat tersebut menunjukkan sesuatu itu dilakukan dengan berlebihan. Modalitas intensional yang menandai kutipan tersebut adalah harapan yang terwujud pada kata *semoga*. Kata ini merepresentasikan pernyataan eksekutor yang menginginkan PPKM segera diperpanjang. Modalitas intensional di sini berfungsi untuk menyatakan sikap pembicara terhadap peristiwa nonaktual yang diungkapkannya (Ima & Dawud, 2021).

Pada data (3) kalimat deklaratif dan modalitas dinamik digunakan dalam menyatakan dukungan. Modalitas dinamik berfungsi untuk menyatakan kemampuan pembicara dalam menghadapi persoalan. Nurmala (2019) memberikan penjelasan bahwa dalam modalitas dinamik terdapat makna kemampuan. Modalitas dinamik yang menandai kutipan tersebut adalah kemampuan atau kesanggupan yang terwujud pada kata *dapat*. Kata ini merepresentasikan pernyataan eksekutor yang memiliki kemampuan untuk memahami penyebab PPKM terus diperpanjang.

Kontra terhadap Kebijakan Pemerintah

Bentuk kontra terhadap kebijakan pemerintah dapat berupa penolakan, kritikan atau demonstrasi. Eksekutornya meliputi kelompok oposisi, mahasiswa, para ahli, atau bahkan

rakyat. Bentuk yang menunjukkan kontra terhadap kebijakan pemerintah ditunjukkan oleh artikel (APS3), (APS4), dan (APS5). Berikut adalah bukti kutipannya.

- (4) Sebagai salah seorang rakyat yang juga terkena imbas dari sejak awal wabah, **saya menolak perpanjangan PPKM Darurat Jawa & Bali.** (APS4)
- (5) **Apa kerja kalian**, rakyat tertindas kalian diam saja. **Dengan ini, maka kami menyuarakan keresahan kami di Titik Nol ini. Tolak** PPKM karena dampaknya sangat dirasakan masyarakat. (APS5)
- (6) Jadi saya katakan bahwa **saya akan menolak PPKM Darurat diperpanjang**, asalkan masyarakat penuhi dua syarat tadi yakni tegas melakukan prokes dan siap divaksin. (APS6)

Kutipan-kutipan di atas merupakan bentuk kontra terhadap kebijakan pemerintah dalam memperpanjang PPKM. Pertama, data (4) disampaikan oleh Didi Riyadi, seorang aktor yang menjadi korban PPKM. Kedua, data (5) disampaikan oleh Dani Eko Wiyono, Ketua SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia). Ketiga, data (6) disampaikan oleh Bupati Jembrana, I Nengah Tamba.

Data (4) merupakan contoh penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Eksekutor yang merupakan rakyat juga menjadi korban dari pandemi secara terang-terangan menolak kebijakan pemerintah dengan mengatakan *saya menolak perpanjangan PPKM Darurat Jawa & Bali*. Kalimat tersebut merupakan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi atau berita. Kalimat di atas juga merupakan representasi kalimat penolakan. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya kata *menolak*.

Bentuk kontra terhadap kebijakan pemerintah lainnya ditunjukkan oleh contoh pada kutipan (5). Eksekutor dalam memulai pernyataannya diawali dengan kata *apa* yang merupakan penanda kalimat interogatif. Kalimat interogatif merupakan kalimat yang diawali dengan kata tanya dan memerlukan jawaban (Ima & Dawud, 2021). Tujuan menggunakan kalimat interogatif adalah untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain. Dalam konteks kutipan tersebut tujuan penggunaan kalimat interogatif adalah untuk mempertanyakan kinerja pemerintah selama pandemi menjangkit. Hal tersebut dibuktikan dalam klausa *Apa kerja kalian*. Kemudian eksekutor menggunakan modalitas epistemik kepastian yang ditandai dengan penggunaan frasa *dengan ini* dalam kalimat *dengan ini, maka kami menyuarakan keresahan kami di Titik Nol ini*. Selanjutnya eksekutor menggunakan kalimat penolakan yang ditandai dengan penggunaan kata *tolak*.

Kutipan (6) juga merupakan contoh kontra terhadap kebijakan pemerintah. Pada awal pernyataannya eksekutor menggunakan modalitas epistemik. Modalitas epistemik tertuang pada kalimat *jadi saya katakan bahwa saya akan menolak PPKM Darurat diperpanjang*. Dalam pernyataan eksekutor juga ditemui adanya hubungan antara penolakan kebijakan dengan kebijakan pemerintah yang lain. Pernyataan yang disampaikan oleh eksekutor termasuk dalam kalimat deklaratif. Fungsi kalimat deklaratif adalah untuk menciptakan hal yang baru meliputi status atau keadaan.

3.2 Mekanisme Pertarungan Simbolik

Pemerintah dalam rangka menyukseskan agenda dan rencana-rencananya tentu membutuhkan mekanisme atau strategi yang jitu. Oleh karenanya untuk memuluskan jalannya kebijakan-kebijakan dalam mengatasi COVID-19 pemerintah juga telah menyiapkannya dengan

matang. Mekanisme yang terjadi dalam pertarungan simbolik terbagi menjadi dua, yakni (1) eufimisasi dan (2) pelogisan.

Eufimisasi

Salah satu cara pemerintah untuk merealisasikan tujuannya adalah dengan menggunakan eufimisasi. Eufemisme merupakan mekanisme atau strategi yang bekerja dengan cara menghaluskan makna atau tujuan yang sesungguhnya, sehingga makna dan tujuan yang asli tidak terlihat, samar-samar, dan sulit dikenali. Wahyuni (2008) menguraikan bentuk-bentuk eufimisasi dapat berupa kepercayaan, keyakinan, ketulusan, etiket, hutang, atau simpati. Misalnya, pemerintah menggunakan istilah pembatasan kegiatan, bukan pelarangan kegiatan karena apabila kata pelarangan itu dipakai tentu akan menimbulkan keributan dan kegaduhan yang dapat memperburuk keadaan. Eufimisasi yang digunakan pemerintah ditunjukkan oleh artikel (APS7) dan (APS8). Berikut adalah bukti-bukti pemerintah menggunakan eufimisasi.

- (7) Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini, untuk mengendalikan COVID-19 karena **bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat**. (APS7)
- (8) **PPKM darurat ini sebagai ikhtiar untuk mencegah peningkatan jumlah kasus positif** COVID-19 dari sektor hulunya, supaya kasus di Indonesia tidak meledak seperti India, Afrika, dan negara-negara di Eropa. (APS8)

Kutipan-kutipan di atas merupakan mekanisme eufimisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyukseskan kebijakannya. Pertama, data (7) disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Kedua, kutipan (8) dilontarkan oleh Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.

Data (7) merupakan contoh eufemisme yang digunakan pemerintah dalam memperlancar jalannya perpanjangan PPKM. Eksekutor yang merupakan orang nomor satu di Indonesia mengatakan bahwa *PPKM bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat*. Artinya bahwa PPKM tersebut memihak kepentingan rakyat. Pernyataan tersebut merepresentasikan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kehidupan rakyat. Selain itu pernyataan tersebut juga menggunakan modalitas dinamik yang ditandai dengan penggunaan kata *bisa*. Penggunaan modalitas dinamik bertujuan untuk merepresentasikan kemampuan atau kesanggupan. Dalam konteks perpanjangan PPKM, modalitas dinamik digunakan untuk membangun citra diri pemerintah sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan rakyat.

Data (APS8) juga merupakan contoh eufemisme yang digunakan pemerintah dalam memperlancar jalannya perpanjangan PPKM. Eksekutor kutipan tersebut merupakan bagian dari pemerintah karena partai politik eksekutor merupakan partai koalisi pemerintah. Tentu dengan latar belakang tersebut eksekutor memihak dan membantu pemerintah dalam memperpanjang PPKM. Eksekutor mengatakan bahwa *PPKM darurat ini sebagai ikhtiar untuk mencegah peningkatan jumlah kasus positif*. Penggunaan kata *ikhtiar* merupakan bukti eufimisasi. Kata yang memiliki arti syarat untuk mencapai maksud tersebut terkesan halus dan menandakan sopan santun serta kesetiaan. Penggunaan kata *ikhtiar* dalam wacana perpanjangan PPKM bertujuan untuk menarik simpati rakyat secara halus dan samar agar rakyat mau menerima dan mendukung kebijakan perpanjangan PPKM.

Eufimisasi tidak hanya digunakan dalam rangka menyukseskan jalannya pemerintahan saja. Namun, di lain pihak kelompok oposisi juga menggunakan eufimisasi untuk menolak,

menyangkal, dan menentang setiap kebijakan atau pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Eufimisasi yang digunakan kelompok oposisi ditunjukkan oleh artikel (APS9) dan (APS10). Berikut adalah bukti-bukti kutipannya.

- (9) Suasana seperti mencekam, ruas jalan banyak yang ditutup, penerangan jalan umum dimatikan, PKL atau pedagang kecil susah berjualan karena *diopyak-opyak*, harga sayur mayur naik, orang sakit makin panik karena cari ambulans susah, rakyat kecil cari makan kesulitan dan lain-lain. **Mohon Presiden Jokowi segera mengevaluasi kebijakan ini.** (APS9)
- (10) Kami dirugikan. Kontrakan tetap harus dibayar dan tidak ada keringanan. **Apakah ini solusi? Ada aturan harusnya ada solusi.** Istri dan anak saya harus makan. (APS10)

Kutipan-kutipan di atas merupakan contoh eufimisasi yang digunakan oleh kelompok oposisi. Pertama, data (9) disampaikan oleh Komisioner Komisi Informasi (KI), Provinsi Jawa Tengah, Zainal Abidin Petir. Kedua, data (10) dilontarkan oleh salah satu pedagang yang berjualan di mal Bandung Elektronik City (BEC), Putra.

Pada data (9) eksekutor memulai pernyataannya dengan menjelaskan situasi yang dialaminya selama kebijakan PPKM diterapkan. Kemudian eksekutor menolak kebijakan tersebut dengan menunjukkan kesopanan dan cara yang halus. Eksekutor mengatakan *mohon Presiden Jokowi segera mengevaluasi kebijakan ini* merupakan eufimisasi yang digunakan untuk menolak kebijakan PPKM. Dikatakan sebagai penolakan karena di dalam pernyataannya eksekutor tidak menunjukkan tanda-tanda dukungannya kepada pemerintah. Awal kalimat dalam pernyataan eksekutor yang menjelaskan situasi yang dialaminya merupakan sebuah kalimat yang penuh dengan keluhan. Kutipan di atas menggunakan kalimat imperatif dan modalitas intensional. Kalimat imperatif ialah kalimat yang bermaksud meminta dan memerintah agar yang diinginkannya dapat terwujud. Modalitas intensional yang menandai kutipan tersebut adalah permohonan yang terwujud dalam kata *mohon*. Kata *mohon* merepresentasikan pernyataan dari eksekutor yang meminta kepada presiden agar kebijakan PPKM dievaluasi.

Pada data (10) pertanyaan *apakah ini solusi? Ada aturan harusnya ada solusi* merupakan eufimisasi untuk menolak kebijakan PPKM. Kalimat tersebut dianggap sebagai penolakan karena mempertanyakan kinerja pemerintah selama pandemi ini. Sejak pandemi ini menyebar di Indonesia pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan untuk menanggulunginya. Namun dalam kalimat di atas aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak menunjukkan solusi sama sekali. Eksekutor lebih memilih mempertanyakan kinerja pemerintah daripada secara terang-terangan menolak kebijakan tersebut. Kutipan di atas menggunakan kalimat interogatif dan modalitas epistemik. Kalimat interogatif ditandai dengan penggunaan kata *apakah*. Dalam konteks kutipan tersebut kalimat interogatif bertujuan untuk mempertanyakan kinerja pemerintah selama ini. Eksekutor menggunakan modalitas epistemik keharusan yang ditandai dengan penggunaan kata *harusnya*.

Pelogisan

Mekanisme pertarungan simbolik lainnya adalah pelogisan. Pelogisan bekerja dengan cara membuat masuk akal sebuah wacana dan menghubungkannya dengan realita atau kenyataan yang ada. Pemerintah menggunakan pelogisan dalam wacananya agar dapat diterima akal

sehat rakyat. Di lain sisi kelompok oposisi juga mampu menggunakan pelogisan agar wacananya mendapat simpati dan dapat mempengaruhi akal sehat rakyat. Contoh bentuk pelogisan ditunjukkan oleh artikel (APS1) dan (APS11). Berikut adalah bukti-bukti kutipannya.

- (11) Saya ingatkan ancaman Covid saat ini semakin serius. **Bahkan sudah menjangkiti anak-anak.** (APS1)
- (12) **Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan Penerapan PPKM Level IV dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021.** Namun kita akan lakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati. Hal-hal teknis lainnya akan dijelaskan oleh Menko (Menteri Koordinator) dan Menteri terkait. (APS11)

Kutipan-kutipan di atas merupakan contoh bentuk pelogisan yang digunakan pemerintah dalam wacana perpanjangan PPKM. Pertama, data (11) disampaikan oleh Abdul Muhaimin Iskandar selaku Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Kedua, data (12) dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Eksekutor pada data (11) merupakan orang yang pro pemerintah. Oleh karenanya tentu logis dan wajar apabila mendukung pemerintah memperpanjang PPKM. Eksekutor menggunakan strategi pelogisan dengan cara mengaitkan kebijakan PPKM dengan kehidupan anak-anak. Eksekutor mengatakan bahwa COVID-19 *bahkan sudah menjangkiti anak-anak*. Pernyataan tersebut berusaha membuat masuk akal PPKM diperpanjang. Tujuannya adalah agar perpanjangan PPKM dapat diterima oleh masyarakat. Pelogisan dalam pernyataan tersebut ditandai dengan kata *bahkan*. Penggunaan kata *bahkan* dalam kalimat eksekutor tersebut bertujuan untuk menghubungkan COVID-19 dengan kehidupan anak-anak sekaligus mempertegas urgensi perpanjangan PPKM.

Pada data (12) kalimat *dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial* menjadi alasan PPKM harus diperpanjang. Eksekutor mencoba mengaitkan PPKM dengan segala aspek kehidupan. Karena itu logislah kebijakan perpanjangan PPKM diambil untuk memperbaiki aspek-aspek kehidupan. Terlebih aspek kesehatan dan ekonomi adalah aspek yang vital. Dalam pernyataan di atas eksekutor menggunakan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif tertuang pada kalimat *saya memutuskan untuk melanjutkan Penerapan PPKM Level IV dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021*. Dalam konteks tersebut penggunaan kalimat deklaratif berfungsi untuk menginformasikan kepada khalayak ramai bahwa presiden akan melanjutkan perpanjangan PPKM.

Di samping pemerintah, kelompok oposisi juga dapat menggunakan mekanisme pelogisan. Pelogisan oleh kelompok oposisi dapat digunakan untuk menolak, menyangkal atau menentang kebijakan pemerintah. Hal tersebut ditunjukkan oleh artikel (APS4) dan (APS12). Berikut adalah bukti kutipannya.

- (13) Simple saja Pak, sudah pasti banyak yang kena imbasnya terlebih lagi soal perut, **banyak yang tidak bisa kerja, tidak bisa menafkahi keluarganya.** Faktanya, sejak awal pandemi sampai dengan sekarang **banyak usaha yang gulung tikar, karyawan di PHK, seniman dan musisi tidak lagi bisa manggung.** (APS4)

- (14) Dari Maluku **kami menyerukan agar Presiden Jokowi segera mundur**, karena beliau telah gagal. Kebijakannya di situasi sulit saat ini justru membunuh masyarakat. Yang paling ironis di saat masyarakat Indonesia dibatasi secara ketat, **pemerintah malah mengizinkan tenaga kerja asing dari China terus bebas masuk ke wilayah Indonesia termasuk ke Maluku.** (APS12)

Kutipan-kutipan di atas merupakan contoh pelogisan yang digunakan kelompok oposisi. Contoh-contoh di atas merupakan tandingan atas pelogisan yang disampaikan oleh pemerintah. Pertama, data (13) disampaikan oleh Didi Riyadi, aktor yang menjadi korban terdampak pandemi. Kedua, data (14) disampaikan oleh mahasiswa dari Universitas Pattimura Ambon saat demonstrasi di kawasan Tugu dr. Johannes Leimana.

Data (13) merupakan tandingan atas wacana yang disampaikan oleh pemerintah. Perpanjangan PPKM selalu menjadikan rakyat sebagai korban, penderita atau tumbal. Oleh karenanya kebijakan perpanjangan PPKM selalu ditolak. Alasannya adalah *banyak yang tidak bisa kerja, tidak bisa menafkahi keluarganya*. Dalam wacananya eksekutor berusaha mengaitkan antara kebijakan PPKM dengan kebutuhan hidup rakyat. Ditambah lagi alasan bahwa *banyak usaha yang gulung tikar, karyawan di PHK, seniman dan musisi tidak lagi bisa manggung*. Penolakan oleh eksekutor dilakukan dengan cara menghubungkan dengan fakta dan realita yang ada. Karena itu logis jika eksekutor atas nama rakyat menolak kebijakan PPKM. Begitu pula jika PPKM dianggap kebijakan yang tidak efektif dan berhasil. Wacana eksekutor menggunakan kalimat deklaratif dan menggunakan modalitas dinamik. Modalitas dinamik merepresentasikan kesanggupan atau kemampuan yang ditandai dengan adanya penggunaan kata *bisa*. Namun dalam wacana di atas, modalitas dinamik dinegasikan sehingga kata *bisa* menjadi *tidak bisa*.

Data (14) juga merupakan tandingan atas pelogisan wacana yang dilakukan oleh pemerintah. Setelah berjalan sekian waktu, kebijakan PPKM selalu menelan korban, yaitu rakyat. Rakyat selalu menjadi objek untuk dikorbankan dalam kebijakan pemerintah. Perpanjangan PPKM mengakibatkan rakyat harus kehilangan pekerjaan atau mata pencahariannya. Oleh karena itu, demonstrasi dilakukan mahasiswa untuk menolak kebijakan PPKM. Mahasiswa mengatakan *kami menyerukan agar Presiden Jokowi segera mundur*. Dianggap sebagai penolakan terhadap PPKM karena pernyataan mahasiswa tersebut mengandung makna bahwa presiden tidak mampu mengatasi masalah pandemi. Mahasiswa juga mengaitkan kebijakan PPKM dengan realita yang ada, yaitu dunia pekerjaan. Di saat rakyat kesusahan mencari pekerjaan, *pemerintah malah mengizinkan tenaga kerja asing dari China terus bebas masuk ke wilayah Indonesia termasuk ke Maluku* karena alasan-alasan tersebut logis jika mahasiswa menolak kebijakan PPKM. Alasan ketidakmampuan presiden mengatasi masalah pandemi juga menjadi hal yang logis pula. Berdasarkan data di atas mahasiswa menggunakan kalimat deklaratif yang ditandai dengan penggunaan klausa *kami menyerukan*.

3.3. Alasan Terjadinya Pertarungan Simbolik

Dalam wacana perpanjangan PPKM dapat dijumpai alasan yang menyebabkan terjadinya pertarungan simbolik. Satu-satunya alasan yang menyebabkan pertarungan simbolik adalah adanya faktor perbedaan kepentingan. Kepentingan yang dibawa oleh pemerintah tentu berbeda dengan kepentingan yang dibawa oleh kelompok oposisi. Tidak jarang kepentingan dari dua kelompok yang berbeda saling bertabrakan. Kepentingan pemerintah dalam

wacana perpanjangan PPKM ditunjukkan oleh artikel (APS7) dan (APS13). Berikut adalah bukti kepentingan yang dibawa oleh pemerintah dalam wacana perpanjangan PPKM.

- (15) Saya minta satu hal yang sederhana ini, **tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak**. Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan wabah ini. (APS7)
- (16) Saya banyak memperoleh pertanyaan, apakah PPKM dilanjutkan atau dihentikan? Saya ingin jelaskan **selama Covid masih jadi pandemi, PPKM akan tetap digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan aktivitas dan mobilitas masyarakat**. (APS13)

Kutipan-kutipan di atas merupakan contoh kepentingan pemerintah selama pandemi berlangsung. Pertama, data (15) disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Kedua, data (16) dilontarkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

Data (15) disampaikan oleh orang nomor satu di negara ini yang diucapkan dengan tujuan dan kepentingan tertentu. Kepentingan itu dapat berbentuk tersirat atau tersurat. Dalam masa pandemi ini, eksekutor meminta masyarakat *tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak*. Pernyataan eksekutor tersebut mengindikasikan kepentingannya. Dengan adanya aturan PPKM, eksekutor ingin agar masyarakat tetap tinggal di rumah, sebagai langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam menghentikan penyebaran COVID-19. Maka dari itu secara tidak langsung eksekutor menyatakan bahwa PPKM akan terus berlanjut. Kalimat eksekutor di atas menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif ditandai dengan adanya partikel *-lah* pada kata *tinggallah*. Artinya eksekutor meminta kepada masyarakat agar untuk tetap tinggal di rumah. Tujuan digunakannya kalimat imperatif adalah untuk memberi perintah atau meminta sesuatu kepada orang lain agar keinginannya terpenuhi.

Pada data (16) eksekutor merupakan salah satu pejabat tinggi negara. Posisi dan kedudukannya itu tentu tidak lepas dengan kepentingan. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa dalam masa-masa krisis ini pemerintah dalam setiap tindakannya selalu membawa kepentingannya. Dalam wacana PPKM, eksekutor mengatakan *selama Covid masih jadi pandemi, PPKM akan tetap digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan aktivitas dan mobilitas masyarakat*. Artinya PPKM akan terus diperpanjang, selama kasus Covid masih ada dan terus menjangkiti masyarakat. Kepentingan pemerintah terlihat jelas bahwa alasan untuk memperpanjang PPKM bukan hanya karena Covid yang masih menyebar, tetapi juga dilandasi dengan kepentingan sosial yaitu *untuk mengendalikan aktivitas dan mobilitas masyarakat*. Eksekutor dalam wacana di atas menggunakan kalimat interogatif. Kalimat interogatif ditandai dengan penggunaan kata *apakah*. Tujuan kalimat interogatif digunakan adalah untuk mengajukan pertanyaan retorik kepada masyarakat.

Kepentingan-kepentingan pemerintah selama masa pandemi mendapat tandingan dari berbagai kalangan. Baik itu kelompok oposisi, mahasiswa atau rakyat. Kelompok-kelompok yang berani menentang kepentingan pemerintah itu dilatarbelakangi oleh kepentingan mereka sendiri. Dalam melihat suatu permasalahan, mereka menilai dari sudut pandang yang berbeda dari pemerintah. Kepentingan-kepentingan yang dibawa oleh kelompok oposisi, mahasiswa atau rakyat ditunjukkan oleh artikel (APS14) dan (APS15). Berikut adalah bukti kutipan yang menunjukkan kepentingan.

- (17) Tidak bisa disalahkan jika masyarakat acap kali masih melanggar kebijakan **karena masyarakat kecil yang tersendat roda perekonomiannya terpaksa untuk terus mengais rezeki demi menyambung hidupnya.** Pilihan mereka adalah bertaruh dengan Covid dan kebijakan pemerintah atau mati kelaparan
- (18) **Pemko jangan terlalu sering mengimbau.** Masyarakat bisa jenuh. **Sebaiknya memperbanyak penyaluran bantuan.** Karena kalau kebutuhan dasar sudah terpenuhi, maka masyarakat pun akan merasa nyaman dalam menaati aturan-aturan PPKM.

Kutipan-kutipan di atas merupakan bukti kepentingan yang dimiliki oleh rakyat dan mahasiswa. Kutipan di atas juga menjadi tandingan atas kepentingan pemerintah. Pertama, data (17) disampaikan oleh Aditya Insani, Koordinator Barisan Aksi Masyarakat Bandung Raya (BAMBR). Kedua, data (18) dilontarkan oleh Antasari Fahriannor, Menteri Advokasi di Dewan Eksekutif Mahasiswa (Demas) Universitas Islam Negeri (UIN).

Data (17) menjadi wacana tandingan atas kepentingan pemerintah masa pandemi. Selama pandemi ini berlangsung, pemerintah banyak mengeluarkan berbagai kebijakannya antara lain PPKM itu sendiri, meskipun dalam praktiknya PPKM tersebut tidak berjalan mulus sesuai perkiraan. Banyak pihak yang dirugikan terutama rakyat. Kepentingan pemerintah menginginkan masyarakat agar selalu tinggal di rumah dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran Covid. Akan tetapi masyarakat punya pandangannya sendiri. Mereka berani menentang kebijakan pemerintah untuk keluar rumah *karena masyarakat kecil yang tersendat roda perekonomiannya terpaksa untuk terus mengais rezeki demi menyambung hidupnya.* Penggunaan kata *terpaksa* menunjukkan bahwa masyarakat berada dalam pilihan yang sulit. Untuk dapat menyambung hidupnya, masyarakat mau tidak mau harus berani melanggar aturan pemerintah. Pada kenyataannya, jika kehidupan masyarakat tidak terpenuhi maka kelangsungan hidup mereka akan terancam. Oleh karena itu, atas nama rakyat eksekutor berani menentang dan menolak kebijakan PPKM.

Pada data (18) wacana yang disampaikan oleh eksekutor menjadi tandingan atas wacana yang disampaikan oleh pemerintah. Selama PPKM berlangsung pemerintah melalui banyak menteri atau jubarinya selalu memberi pengumuman, peringatan atau himbauan. Akan tetapi, oleh eksekutor hal tersebut dianggap terlalu berlebihan. Eksekutor mengatakan *Pemko jangan terlalu sering mengimbau.* Eksekutor menganggap pemerintah selama ini hanya gencar mengkampanyekan perpanjangan PPKM tetapi tidak diimbangi dengan bantuan. Oleh karenanya eksekutor mengatakan *sebaiknya memperbanyak penyaluran bantuan.* Kepentingan pemerintah menggencarkan perpanjangan PPKM agar jumlah masyarakat yang terinfeksi Covid kian menurun. Di sisi lain, mahasiswa menganggap kepentingan pemerintah tersebut tidak berpihak pada masyarakat. Kepentingan yang dibawa oleh mahasiswa adalah menginginkan bantuan sosial turun kepada masyarakat.

4. Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan. Wacana perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi arena pertarungan simbolik antara kelompok ortodoxa yaitu pemerintah dengan kelompok heterodoxa yaitu oposisi atau kelompok penentang pemerintah. Wacana-wacana tentang PPKM dimaknai sebagai langkah pemerintah dalam menaklukkan pandemi COVID-19 sekaligus sebagai usaha untuk menyelamatkan hidup rakyat. Di sisi lain, perpanjangan PPKM dimaknai oleh kelompok heterodoxa

sebagai satu kebijakan yang sia-sia. Kebijakan tersebut dianggap gagal dalam mengatasi pandemi ini. Pertarungan simbolik yang dilakukan pemerintah dengan kelompok oposisi menunjukkan dua bentuk yaitu (1) pro pemerintah dan (2) kontra pemerintah. Wacana yang disampaikan pemerintah selalu ditandingi oleh wacana yang dilontarkan oposisi dan pengamat, begitu juga sebaliknya wacana kelompok heterodoxa terus ditentang oleh pemerintah. Mekanisme yang terdapat pada pertarungan simbolik terdiri atas eufimisasi dan pelogisan. Eufimisasi dijalankan dengan cara menghaluskan atau menyamarkan makna sesungguhnya dari suatu wacana. Sedangkan pelogisan dilakukan dengan cara membuat wacana menjadi masuk akal dan menghubungkannya dengan realita yang ada. Alasan terjadinya pertarungan simbolik dalam wacana perpanjangan PPKM adalah perbedaan kepentingan. Pemerintah memiliki kepentingannya sendiri, begitu pula dengan kelompok oposisi. Kepentingan-kepentingan itu disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Dari sudut pandang analisis wacana kritis kebijakan perpanjangan PPKM ini tentu memiliki kepentingan-kepentingan tersembunyi. Begitu pula dengan oposisi yang menolak kebijakan pemerintah tersebut juga memiliki kepentingan yang tersembunyi.

Daftar Rujukan

- Andriana, G., Tarmini, W., & Wetty, N. N. (2015). Struktur kalimat dalam teks anekdot pada surat kabar tempo edisi november 2014. *Jurnal Kata*, 1-12.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Cambridge: Polity Press.
- Dinurriyah, I. S. (2013). Konstruksi jender dalam pertarungan simbolik di media massa. *Jurnal Komunikasi Islam*, 3(2), 268–291.
- Eriyanto. (2006). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Fairclough, N. (2006). *Discourse and sosial change*. Cambridge: Polity Press.
- Furchan, A. (1992). *Pengantar metodologi penelitian kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ima, S. S. & Dawud. (2021). Fungsi representasi ideologi kekuasaan dalam tuturan mata najwa bertema politik. *JoLLA: Journal of Language, Literature, and Arts*, 1(8), 1011–1024. <https://doi.org/10.17977/um064v1i82021p1011-1024>
- Jazery, M. (2009). Pertarungan simbolik dalam wacana bantuan khusus mahasiswa. *LITERA*, 8(1), 33–45. <https://doi.org/10.21831/ltr.v8i1.1200>
- Kamus besar bahasa Indonesia online*. (2021). Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandemi>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*. Surakarta: Cakra Books.
- Nurmala, A. (2019). Aspek modalitas dalam novel “Ayat-Ayat Cinta” dan novel “Dalam Mihrab Cinta.” *Dinamika*, 2(1), 1-9. <https://doi.org/10.35194/jd.v2i1.582>
- Pribadi, F. (2016). Kekerasan simbolik media massa (Kekerasan simbolik dalam pemberitaan kasus peredaran video asusila di media massa online: Kajian sosiologi komunikasi). *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 1(2), 127–139. <https://doi.org/10.17977/um021v1i22016p127>
- Saraswati, A., & Sartini, N. W. (2017). Wacana perlawanan Persebaya 1927 terhadap PSSI: Analisis wacana kritis Norman Fairclough. *Mozaik Humaniora*, 17(2), 181–191.
- Taqwa, G. K., & Sadewo, F. S. (2016). Kekerasan simbolik pada perempuan janda di Kabupaten Sidoarjo. *Paradigma*, 4(3), 1–8.
- Wahyuni, L. (2008). Kekuasaan simbolik dalam wacana politik di media cetak. *Kajian Linguistik dan Sastra*, 20(2), 108–120.
- Wahyuni, L. (2014). Praktik konstruksi jender di media massa. *LITERA*, 13(2), 226–236. <https://doi.org/10.21831/ltr.v13i2.2577>